



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2024

BPKAD
Kabupaten Sidoarjo

Jl. Pahlawan No. 56

Email :
bpkad@sidoarjokab.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja.

Sidoarjo, 13 Februari 2025

**TIM SAKIP KAB. SIDOARJO,
SEKRETARIS**



Ditandatangani secara elektronik oleh

dr. ATOK IRAWAN, Sp.P., M.Kes.
NIP. 196605011996021001

dr. ATOK IRAWAN, Sp.P, M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP 196605011996021001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024 disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor Nomor 7 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang pedoman Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai selama tahun 2024. Diharapkan LKjIP ini dapat memberikan informasi yang diharapkan seluruh stakeholders, Tanggapan (*feedback*) serta saran-saran untuk perbaikan terhadap laporan yang kami susun sangat kami harapkan guna peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Sidoarjo, 5 Februari 2025

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH**



Ditandatangani secara elektronik oleh

CHUSNUL INAYAH, SE

NIP. 197203171996022001

CHUSNUL INAYAH, SE, M.HP

Pembina Utama Muda

NIP. 19720317 199602 2 001

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR GAMBAR	vi
IKHTISAR EKSEKUTIF	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Kedudukan	1
B. Aspek Strategis OPD	6
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	8
A. Renstra Tahun 2021-2026	8
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	9
C. Perencanaan Anggaran Tahun 2024	9
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	11
A. Pengukuran Kinerja	11
B. Realisasi Kinerja Anggaran	26
C. Inovasi	32
BAB IV : PENUTUP	36
LAMPIRAN- LAMPIRAN	38

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data ASN Jumlah Kebutuhan dan Existing ASN	
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo	2
Tabel 1.2 Data Existing ASN BPKAD Per 1 Januari 2024	3
Tabel 1.3 Pemetaan Permasalahan Pokok, masalah dan akar masalah	7
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD Tahun 2021-2026	8
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	9
Tabel 2.3 Perencanaan Anggaran Pada Tahun 2024.....	10
Tabel 2.4 Rincian Anggaran Pada Tahun 2024	10
Tabel 3.1 Capaian Kinerja BPKAD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024	11
Tabel 3.2 OPD Yang Ada Di Kabupaten Sidoarjo.....	13
Table 3.3 Tren Realisasi (IK) Persentase LKPD sesuai SAP Tahun 2021-2024	15
Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase LKPD sesuai SAP di Tingkat Nasional	16
Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase LKPD sesuai SAP di Tingkat Provinsi	16
Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase LKPD sesuai SAP dibandingkan Kabupaten/Kota Lain	17
Tabel 3.7 Aset Tetap Terdokumentasi Legal	18
Tabel 3.8 Jumlah Tanah yang Bersertifikat.....	18
Tabel 3.9 Tren Realisasi dari (IK) Persentase aset tetap terdokumentasi legal Tahun 2021-2024	19
Tabel 3.10 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Aset terdokumenetasi legal dibandingkan Kabupaten/Kota Lain	20
Tabel 3.11 Tren Realisasi dari (IK) Nilai SAKIP Tahun 2021-2024	22
Tabel 3.13 Tren Realisasi dari (IK) Nilai IPP Tahun 2021-2024.....	23
Tabel 3.14 Tren Realisasi dari (IK) Nilai SKM Tahun 2021-2024.....	24
Tabel 3.15 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran serta Tingkat Efisiensi Tahun 2024.....	27
Tabel 3.16 Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.....	29

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Tren Realisasi dari (IK) Presentase LKPD

Sesuai SAP Tahun 2021-2024..... 15

Grafik 3.2 Tren Realisasi dari (IK) Presentase Aset tetap terdokumentasi Legal

Tahun 2021-2024..... 19

Grafik 3.3 Tren Realisasi dari (IK) Nilai SAKIP, Nilai PMRB,Nilai IPP dan Nilai SKM

Tahun 2021-2024..... 26



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 SOTK Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo2



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja BPKAD, yang memberikan gambaran mengenai keberhasilan dan kegagalan kinerja BPKAD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2024 yang didasari oleh Rencana Strategis BPKAD Tahun 2021-2026.

Secara umum capaian kinerja BPKAD dapat dikategorikan sangat memuaskan, dari 2 (dua) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja, kami sampaikan capaian kinerjanya sebagai berikut :

- 1) Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 2 indikator;
- 2) Target dengan capaian realisasi 100% sebanyak 1 indikator;
- 3) Target dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 2 indikator;
- 4) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang sesuai ketentuan dan akuntabel	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai SAP	100%	100%	100%	Sangat Baik
		Persentase aset tetap terdokumentasi legal	99,96%	100,04%	100,08%	Sangat Baik
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	A (84)	A (84,86)	101,02%	Sangat Baik
		Nilai IPP	A- (4,07)	A- (4,24)	104,69%	Sangat Baik
		Nilai SKM	Sangat Baik (97,00)	Sangat Baik (96,66)	99,64%	Sangat Baik

Sumber Data : Laporan Keuangan dan laporan BMD Tahun 2024

KETERANGAN :

No.	Nilai	Predikat Kinerja
1	$> 90,01$	Sangat Baik
2	$80,01 \leq 90$	Baik
3	$70,01 \leq 80$	Cukup
4	$0 \leq 70,01$	Kurang

Dari hasil capaian kinerja diatas dapat disimpulkan 3 (tiga) sasaran pada Tahun 2024 rata – rata realisasi kinerjanya mencapai 100% atau kategori “Sangat Baik”.

Keberhasilan Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2024, merupakan upaya yang optimal dan secara konsisten akan ditingkatkan pencapaiannya. Kami ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024.

BAB I

PENDAHULUAN

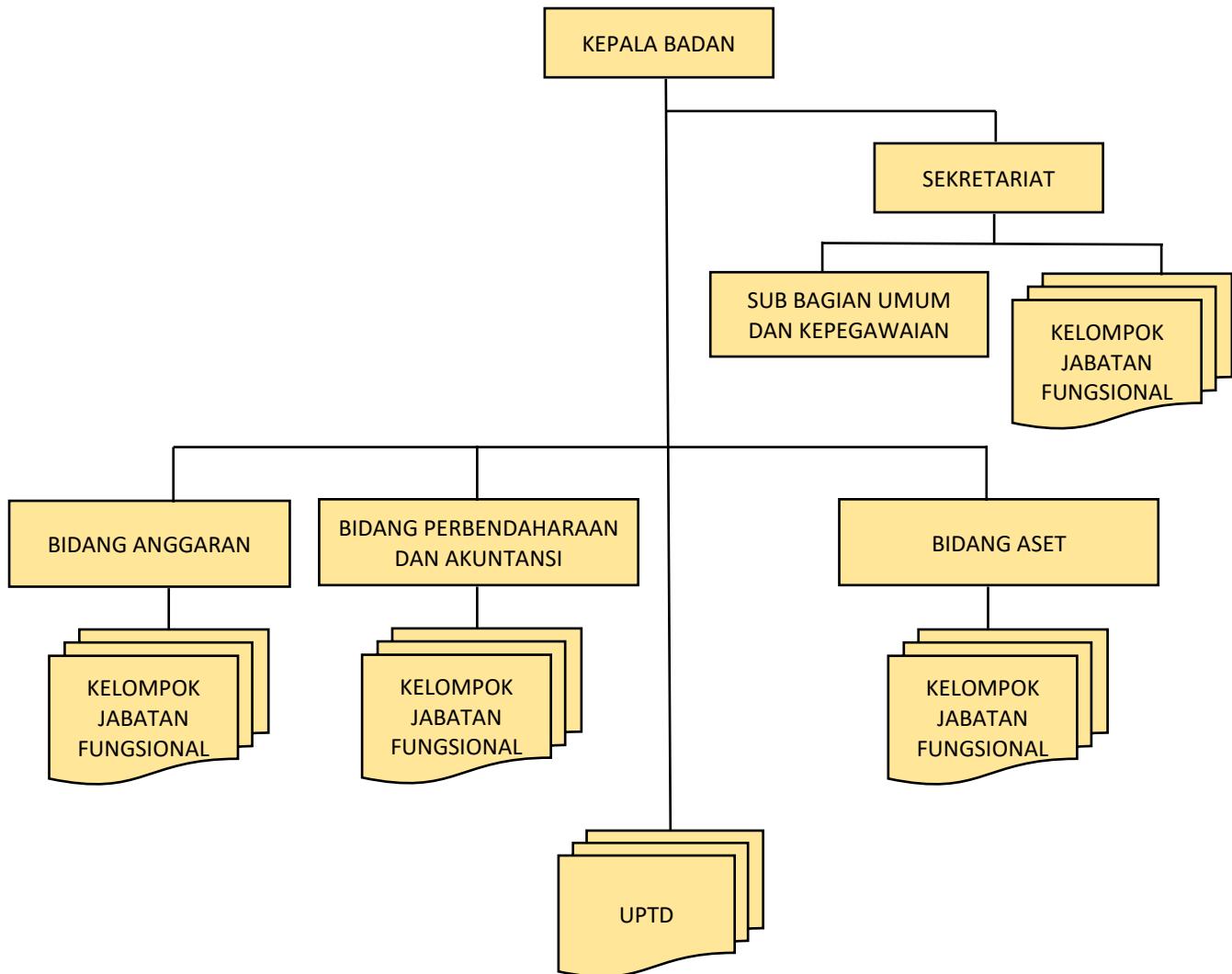
A. Kedudukan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan urusan pemerintahan pada sebagian fungsi penunjang keuangan.

Melalui peraturan daerah diatas maka terbit Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo. Dalam ketentuan tersebut menyebutkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas "Membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang keuangan termasuk aset daerah". Dalam melaksanakan tugas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi Badan;
5. Pelaksanaan fungsi BUD; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo maka disusun struktur organisasi. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo dipimpin oleh Kepala Badan yang dibantu oleh Sekretariat dan bidang teknis. Adapun susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut.



Sumber : Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2022

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo

Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Sidoarjo memiliki ASN sebanyak 64 Orang. ASN tersebut terbagi kedalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Berikut data ASN pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2024.

Tabel 1.1
Data ASN sesuai Jumlah Kebutuhan dan Jumlah Existing
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo

No.	Jenis Jabatan	Jumlah Kebutuhan	Jumlah Existing
1	Kepala Badan	1	1
2	Administrator	4	4
3	Pengawas	1	1
5	Jabatan Fungsional Ahli	10	8
4	Pelaksana	54	50
	Jumlah	70	64

Tabel 1.2

Data Existing ASN Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo
Per 1 Januari Tahun 2025

NO	NAMA/NIP	GOL	JABATAN
1	CHUSNUL INAYAH, SE,M.HP 19720317 199602 2 001 Sidoarjo, 17 Maret 1972	IV/b	Kepala Badan
2	TETY WIDYANTI, SE,MM. 19710825 199803 2 006 Madiun, 25 Agustus 1971	IV/b	Sekretaris
3	MOCH. DJEN ANIS POLANUNU, SE,MM. 19751106 200804 1 002 Surabaya, 6 Nopember 1975	IV/a	Kabid Aset
4	YUNIA FAUZIAH, SE, Ak. 19720916 200501 2 005 Sidoarjo, 16 September 1972	IV/a	Kabid Anggaran
5	NENI SAFRINA, SE, M.Akt. 19720403 200604 2 021 Surabaya, 3 April 1972	III/c	Kabid Perbendaharaan dan Akuntansi
6	ASTRI HAPSARI, SE,Ak,M.AP 19710922 200501 2 005 Yogjakarta, 22 September 1971	IV/a	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
7	KAMALIA SYAFWATI, ST,MT. 19770329 200212 2 005 Pontianak, 29 Maret 1970	IV/a	Analis Kebijakan Ahli Muda
8	DIAN NOVITASARI, SE,M.AP. 19841123 201001 2 023 Sidoarjo, 23 Nopember 1984	III/d	Perencana Ahli Muda
9	YULITA RAHMAWATI, SE,M.A. 19860707 201001 2 019 Sidoarjo, 7 Julu 1986	III/d	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
10	NURUL IZZA, S.Sos 19691005 199103 2 007 Sidoarjo, 5 Oktober 1969	III/d	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
11	RAHMI LAILY TRISNANINGRUM, SH 19850911 200902 2 006 Sidoarjo, 11 September 1985	III/d	Analis Hukum Ahli Muda
12	TOMY TRIAPRILYANTO, ST 19820418 200604 1 013	III/d	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
13	SEPTIN A. PRIANINGSIH, SE,M.Akt. 19820929 201101 2 010 Lumajang, 29 September 1982	III/d	Pengolah Data Perbendaharaan
14	IVA NURFANIS ANGGRAIN, S.STP. 19870418 200602 2 001 Surabaya, 18 April 1987	III/d	Pengelola Pemanfaatan BMD
15	BRAMASTO BAYU NUGROHO, SE 19830619 201001 1 024 Sidoarjo, 19 Juni 1983	III/d	Pengelola Data
16	SUPARNI, SH 19710706 199403 1 005 Trenggalek, 6 Juli 1971	III/d	Pengelola Akuntansi
17	NAFI'AH, SH 19710520 199403 2 011 Sidoarjo, 20 Mei 1971	III/d	Pengelola Kegiatan
18	MODESTA SITINJAK, S.Sos.	III/d	Pengelola Bahan Perencanaan

	19781121 199903 2 002		
	Butanamora, 21 Nopember 1978		
19	RETNO MADYANINGSIH, SAP. M.Si.	III/c	Pengelola Data
	19780321 199803 2 002		
	Surabaya, 21 Maret 1978		
20	INDAHYATI, S.Pd.	III/c	Pengadministrasi Penerimaan
	19690115 199602 2 002		
	Jombang, 15 Januari 1969		
21	YULIAWATI AFDHOLINA ACHMAD, SE	III/c	Pengelola Pendapatan
	19730709 201407 2 002		
	Nganjuk, 9 Juli 1973		
22	ARIES PRASETYANTO, SH.	III/c	Pengelola Data
	19880322 201502 1 002		
	Surabaya, 22 Maret 1988		
23	LIEDIA ISABELLA, A.Md.	III/c	Pengelola Data Belanja dan Laporan Keuangan
	19720929 199703 2 002		
	Sidoarjo, 29 September 1972		
24	ISTIQOMAH, ST.	III/b	Pengelola Data
	19820318 201001 2 013		
	Pemalang, 18 Maret 1982		
25	A'AL BINTI QURROTA AYUN, SE.	III/b	Analis Perencanaan Anggaran
	19960302 201903 2 008		
	Nganjuk, 2 Maret 1996		
26	BAGUS SATYA BRAHA, SE.	III/b	Pengelola Pemanfaatan BMD
	19830405 201101 1 011		
	Surabaya, 5 April 1983		
27	ANISA ILMIANA, A.Md.	III/b	Pengelola Data Belanja dan Laporan Keuangan
	19850714 201101 2 005		
	Surabaya, 14 Juli 1985		
28	RAHARDINA KUSUMA DEWI, A.Md.	III/b	Pengolah Data Bimbingan Akuntansi
	19861017 201101 2 012		
	Surabaya, 17 Oktober 1986		
29	NOVITA NINDYA RAKHMADEWI,A.Md.	III/b	Bendahara
	19841112 201101 2 012		
	Mojokerto, 12 Nopember 1984		
30	AGUS CHAZMI	III/b	Pengadministrasi Umum
	19670102 199301 1 003		
	Sidoarjo, 2 Januari 1967		
31	SUPRIHATIN	III/b	Pengelola Kepegawaian
	19681230 199301 2 001		
	Sidoarjo, 30 Desember 1968		
32	LULUK MAFRUKAH	III/b	Pengelola Keuangan
	19730826 199502 2 001		
	Sidoarjo, 26 Agustus 1973		
33	PUTRI MELATI WANDANSARI, S.Ak.	III/a	Analis Perbendaharaan
	19951002 202203 2 014		
	Surabaya, 2 Oktober 1995		
34	NICCO RIANA MUSLIM, SE.	III/a	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris
	19910406 202203 1 011		
	Kediri, 6 April 1991		
35	DEWI PANJININGRUM, S.Ak.	III/a	Pengolah Data Bimbingan Akuntansi
	19870306 201502 2 002		
	Kebumen, 06 Maret 1987		
36	MOHAMMAD ROIS, SH.	III/a	Pengadministrasi Umum
	19670801 200701 1 045		
	Sidoarjo, 1 Agustus 1967		
37	ARISTYA AYU MENGANTI WASITO, S.Ak.	III/a	Pengelola Bahan Perencanaan
	19880101 201502 2 003		
	Surabaya, 01 Januari 1988		
38	PRIMA FIRDAUSI, A.Md.	III/a	Pengelola Data Belanja dan Laporan Keuangan
	19891014 201502 2 002		

	Sidoarjo, 14 Oktober 1989		
39	SUMA'INAH	III/a	Pengadministrasi Umum
	19700420 200701 2 015		
	Sidoarjo, 20 April 1970		
40	SAYU ROSIDA, A.Md.	III/a	Pengolah Data Perbendaharaan
	19810912 201101 2 002		
	Banyuwangi, 12 September 1981		
41	NURCE MAWARNI, SE	III/a	Pengelola Data
	19810221 201004 2 002		
42	FRENDYMASTA RACHMADIKA, S.Tr.I.P.	III/a	Fasilitator Pemerintahan
	20030226 202409 1 001		
43	UMI NADLOFAH	III/a	Pengolah Data Perbendaharaan
	19721208 200801 2 010		
	Sidoarjo, 8 Desember 1972		
44	SARONI	III/a	Pengolah Data Perbendaharaan
	19750729 200801 1 014		
	Sidoarjo, 29 Juli 1975		
45	CHUSNUL CHULUKIYA	III/a	Pengolah Data Perbendaharaan
	19760824 200801 2 008		
	Pasuruan, 24 Agustus 1976		
46	AKHMAD ERIS SUSANTO	III/a	Pengelola Data
	19760515 200801 1 018		
	Sidoarjo, 15 Mei 1976		
47	M. YUNAN ARIFIN, A.Md.	II/d	Pengelola Data
	19860318 201903 1 005		
	Tuban, 18 Maret 1986		
48	KHUSNUL GHANI	II/d	Pengemudi
	19690822 200902 1 001		
	Sidoarjo, 22 Agustus 1969		
49	BENNY RAKHMAD	II/d	Pengelola Data
	19750329 200902 1 001		
	Sidoarjo, 29 Maret 1975		
50	PITANING ASTUTIK	II/d	Pengelola Pemanfaatan BMD
	19670519 201001 2 001		
	Sidoarjo, 19 Mei 1967		
51	FAISAL YUSUF	II/d	Pengadministrasi Umum
	19661230 201001 1 001		
	Pasuruan, 30 Desember 1966		
52	ROHMAD ZAINUDIN	II/d	Pengelola Pemanfaatan BMD
	19750228 201001 1 003		
	Sidoarjo, 28 Februari 1975		
53	ARIF SOLIHUDDIN	II/d	Pengelola Data
	19730309 201001 1 002		
	Sidoarjo, 9 Maret 1973		
54	RITZANA AISYAH AMINY, A.Md.	II/d	Pengelola Teknologi Informasi
	19970930 202012 2 010		
	Kediri, 30 September 1997		
55	DURITA ARDARANI, A.Md.	II/d	Pengelola Akuntansi
	19901221 202012 2 014		
	Surabaya, 21 Desember 1990		
56	DEWI SARASWATI ADYA PRAMUDITA, A.Md.	II/d	Pengelola Akuntansi
	19961217 202012 2 019		
	Sidoarjo, 17 Desember 1996		
57	SITI NOR INAYAH, A.Md.	II/d	Pengelola Pemanfaatan BMD
	19920520 202012 2 015		
	Lamongan, 20 Mei 1992		
58	ADELIA ZUKHRUF FIRDAUSI, Amd.Kb.N.	II/c	Verifikator Anggaran
	20000519 202202 2 001		

59	SHAHIBUDDIN ANSHARI,A.Md,Kb.N.	II/c	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris
	20000502 202202 1 001		
60	NUR ANDIKA WAHYU T, A.Md,A.Pj.	II/c	Pengadministrasi Pajak
	20000619 202202 1 001		
61	WAHYUDI ABDURRAHMAN, A.Md,Ak.	II/c	Pengelola Data dan Informasi
	20001113 202302 1 001		
62	DANDY FITRAH NUGRAHA, A.Md,Ak.	II/c	Pengelola Data dan Informasi
	20011129 202302 1 002		
63	SIGIT ARIFIYANTO	II/c	Pengelola Data
	19761004 200501 1 009		
	Sidoarjo, 04 Oktober 1976	-	
64	BUDIONO	II/c	Pengadministrasi Umum
	19720413 200801 1 013		
	Sidoarjo, 13 April 1972		

Sumber : Data Kepegawaian Tahun 2024

B. Aspek Strategis Organisasi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pada Tahun 2024 dalam rangka mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan daerah yang optimal pada Aplikasi SIKSDA kami telah melalukan penambahan fitur Non Tunai (pencairan PPB langsung ke bendahara OPD) dan *Paperless* (meminimalisir pengumpulan dokumen fisik untuk pertanggungjawaban belanja dan telah terkoneksi dengan BSRE).

Permasalahan pembangunan yang ada saat ini adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan tersebut harus dapat diidentifikasi oleh perangkat daerah untuk disusun rekomendasi penanganannya. Rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (gap) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Berikut pemetaan permasalahan pokok, masalah dan akar masalah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 1.3
Pemetaan permasalahan pokok, masalah dan akar masalah

No.	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Menjaga dan mengoptimalkan kinerja BPKAD, dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah	1. Tingkat pemahaman penganggaran, penatausahaan keuangan dan BMD di masing – masing PD belum optimal; 2. Masih banyak aset tanah milik pemkab Sidoarjo yang belum bersertifikat.	1. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran terkait pengelolaan keuangan PD; 2. Belum terintegrasi sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah; 3. Penerbitan sertifikat aset tanah bergantung pada lembaga lain yaitu BPN; 4. Setiap tahun barang milik daerah pemkab Sidoarjo akan terus bertambah.

Dari pemetaan permasalahan-permasalahan dikemukakan tersebut di atas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo telah merumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Tingkat pemahaman penganggaran dan penatausahaan keuangan daerah di masing – masing PD belum optimal;
2. Kurang memadainya kompetensi SDM pengelola keuangan dan BMD;
3. Belum terintegrasi sistem penganggaran, perpendaharaan, akuntansi dengan manajemen aset;
4. Masih banyak aset tanah milik pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang belum bersertifikat dikarenakan penerbitan sertifikat aset tanah bergantung pada lembaga lain yaitu BPN.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki visi Mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang sejahtera, maju, berkarakter dan berkelanjutan". Visi tersebut tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026. Dalam dokumen perencanaan 5 tahunan tersebut termuat misi yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah menunjang misi I (satu) yaitu "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha".

Dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis serta memperhatikan misi Kabupaten Sidoarjo maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo 2021 - 2026. Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran / implementasi dari pernyataan misi. Dengan adanya tujuan akan memberikan arah yang lebih jelas untuk mencapai sasaran yang dituju. Berikut Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026, sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026

NO	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR	TARGET					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan penyelenggaran tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang sesuai ketentuan dan akuntabel	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai SAP	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase aset tetap terdokumentasi legal	99,752 %	99,85%	99,96%	99,96%	99,96%	99,97%
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP	A (82,3)	A (83,46)	A (84)	A (84)	A (85)	A (85)
			Nilai IPP	B (3,99)	A- (4,03)	A-(4,04)	A- (4,07)	A-(4,1)	A-(4,15)

			Nilai SKM	Sangat Baik (84,65)	Sangat Baik (96,00)	Sangat Baik (97,00)	Sangat Baik (97,00)	Sangat Baik (97,00)	Sangat Baik (97,00)
--	--	--	-----------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Sumber Data: Renstra BPKAD Tahun 2021 – 2026

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 maka ditetapkan sasaran yang perlu dicapai dan direalisasikan pada setiap tahunnya dengan penguatan pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo. Berikut Perjanjian kinerja tahun 2024 yang memuat sasaran beserta indikator dan target kinerja.

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang sesuai ketentuan dan akuntabel	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai SAP	100%
		Persentase aset tetap terdokumentasi legal	99,96%
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP	A (84)
		Nilai IPP	A- (4,07)
		Nilai SKM	Sangat Baik (97,00)

Sumber Data: Renstra BPKAD Tahun 2021 – 2026

C. Perencanaan Anggaran Tahun 2024

Untuk mewujudkan sasaran dan mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka dialokasikan anggaran sebesar Rp. Rp. 677.541.189.743,00, dengan rincian sebagai mana tabel 2.3 dan 2.4.

Tabel 2.3
Perencanaan Anggaran pada Tahun 2024

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	INTERVENSI PROGRAM
Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang sesuai ketentuan dan akuntabel	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai SAP	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
		Persentase aset tetap terdokumentasi legal	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah	Nilai SAKIP, PMRB, IPP, Nilai SKM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota

Tabel 2.4
Rincian Anggaran pada Tahun 2024

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.750.000,00
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.674.769.931
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	500.000
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.371.029.875
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.409.843.966
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.549.185.512
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	902.842.577
		Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.111.129.575
		Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	153.550.500
		Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	638.505.000
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	652.973.447.649
		Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	3.748.635.158
Total Anggaran			677.541.189.743

Sumber Data : DPPA BPKAD Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja. Pengukuran indikator kinerja sasaran dilaksanakan dalam rangka menjamin adanya peningkatan akuntabilitas kinerja dengan melakukan klarifikasi outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang direncanakan dan diperjanjikan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini pembandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

A. Pengukuran Kinerja

Capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi setiap indikator kinerja program dan didukung dengan data-data yang relevan untuk mengukur dan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi dalam mencapai target Indikator Kinerja Utamanya (IKU) yang telah tertuang dalam tujuan dan sasaran strategis instansi.

Adapun capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realias asi	Capaian (%)	Target Renstra (2026)	Capaian Terhadap Target Renstra 2026 (%)
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan	Persentase laporan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%

	Aset Daerah yang sesuai ketentuan dan akuntabel	perangkat daerah yang sesuai SAP					
		Persentase aset tetap terdokumen tasi legal	99,96%	100,04%	100,08%	99,97%	99,90%
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	A (84)	A (84,86)	101,02%	A (85)	99,09%
		Nilai IPP	A- (4,07)	(*) A- (4,24)	104,69%	A-(4,15)	97,59%
		Nilai SKM	Sangat Baik (97,00)	Sangat Baik (96,66%)	99,64%	Sangat Baik (97,00)	98,45%

Sumber Data : Renstra BPKAD Tahun 2021 – 2026

(*) Catatan : untuk Realisasi IPP Tahun 2024 masih menggunakan hasil penilaian 2023 dikarenakan belum release penilaian 2024

1. Sasaran 1 : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Sesuai Ketentuan dan Akuntabel

a. Indikator Kinerja 1 : Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai SAP

Pengukuran tersebut adalah untuk mengetahui kesesuaian laporan keuangan yang disusun perangkat daerah dengan prinsip – prinsip akuntansi yang ada, dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah OPD yang laporan keuangannya sesuai SAP}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$$

Laporan SAP Berbasis Akrual adalah Laporan SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Manfaat dari basis akrual ini adalah memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan

pemerintah, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah, dan bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi dan pencapaian tujuan.

Jumlah OPD yang ada di Kabupaten Sidoarjo adalah 49 OPD. Berikut rincian OPD yang ada di Sidoarjo :

Tabel 3. 2

OPD yang ada di Kabupaten Sidoarjo

NO.	PERANGKAT DAERAH
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Dinas Kesehatan
3	RSUD Sidoarjo
4	RSUD Sidoarjo Barat
5	Satuan Polisi Pamong Praja
6	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
7	Dinas Sosial
8	Dinas Tenaga Kerja
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana
11	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
12	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
15	Badan Kepegawaian Daerah
16	Sekretariat DPRD
17	Sekretariat Daerah
18	Inspektorat
19	Kecamatan Balongbendo
20	Kecamatan Buduran
21	Kecamatan Candi
22	Kecamatan Gedangan
23	Kecamatan Jabon
24	Kecamatan Krembung
25	Kecamatan Krian
26	Kecamatan Porong
27	Kecamatan Prambon
28	Kecamatan Sedati
29	Kecamatan Sidoarjo
30	Kecamatan Sukodono
31	Kecamatan Taman

32	Kecamatan Tanggulangin
33	Kecamatan Tarik
34	Kecamatan Tulangan
35	Kecamatan Waru
36	Kecamatan Wonoayu
37	Dinas PU BM dan SDA
38	Dinas Perkim CKTR
39	Dinas Perhubungan
40	Dinas Komunikasi dan Informatika
41	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
42	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
43	Dinas Pangan dan Pertanian
44	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
45	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
46	Dinas Perikanan
47	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
48	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
49	Badan Pelayanan Pajak Daerah

Sumber : Perbup No 11 Tahun 2016 dan Perbup NO 40 Tahun 2022

Sehingga dari definisi formulasi perhitungan dapat diuraikan sebagai berikut :

$$\frac{49 \text{ OPD}}{49 \text{ OPD}} \times 100\% = 100 \%$$

Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Tahun 2024 (%)	Target Renstra (2026)	Capaian Terhadap Target Renstra 2026 (%)
100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas Capaian Indikator Kinerja (IK) Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai SAP Tahun 2024 dengan realisasi 100% dari target 100%, dengan persentase sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra Tahun 2026 sebesar 100% maka pada Tahun 2024 sudah tercapai 100%, dengan persentase capaian sebesar 100%. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya mengalami stabil/dinamis, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 3

Tren Realisasi dari (IK) Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai SAP Tahun 2021 – 2024

Tahun	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100%	100%
Capaian	100%	100%	100%	100%

Grafik 3.1

Tren Realisasi dari (IK) Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai SAP Tahun 2021 – 2024



Apabila dibandingkan dengan target kinerja pada tingkat Nasional maka capaian kinerja untuk indikator kinerja persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai SAP ini sama, dikarenakan laporan keuangan yang sesuai SAP merupakan salah satu kriteria dalam pemberian opini audit atas laporan keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan telah memberikan dampak yang signifikan dalam pencapaian kinerja. Berikut perbandingan capaian kinerja pada tingkat Nasional.

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai SAP di Tingkat Nasional

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Kinerja Nasional
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang sesuai ketentuan dan akuntabel	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai SAP	100%	100%

Sedangkan dibandingkan dengan target kinerja pada tingkat Provinsi maka capaian kinerja untuk indikator kinerja persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai SAP ini sama, dikarenakan laporan keuangan yang sesuai SAP merupakan salah satu kriteria dalam pemberian opini audit laporan keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), adapun dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 disebutkan bahwa salah satu indikator kinerja adalah opini audit BPK dengan target WTP. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan telah memberikan dampak yang signifikan dalam pencapaian kinerja. Berikut perbandingan capaian kinerja pada tingkat Provinsi.

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai SAP di Tingkat Provinsi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Kinerja Provinsi
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang sesuai ketentuan dan akuntabel	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai SAP	100%	100%

Apabila dibandingkan dengan target kinerja pada tingkat Kabupaten/Kota maka capaian kinerja untuk indikator kinerja :

1. Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai SAP ini sama, dikarenakan laporan keuangan yang sesuai SAP merupakan salah satu kriteria dalam pemberian opini audit laporan keuangan yang dilaksanakan oleh Badan

Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), adapun dalam Renstra BPKAD Kota Surabaya salah satu indikator kinerja adalah Prosentase OPD yang menyusun laporan keuangan sesuai SAP berbasis akrual. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan telah memberikan dampak yang signifikan dalam pencapaian kinerja.

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Kinerja Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai SAP Dibandingkan Kabupaten/Kota Lain

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Kinerja Kabupaten/Kota	Keterangan
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang sesuai ketentuan dan akuntabel	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai SAP	100%	100%	BPKAD Kota Surabaya

Sumber Data: Renstra BPKAD Kota Surabaya

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2024 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan agar semakin banyak OPD yang melaporkan Laporan Keuangannya sesuai SAP yaitu:

- 1) Pendampingan dan verifikasi penyusunan APBD/PAPBD;
- 2) Pendampingan penyusunan laporan keuangan;
- 3) Rekonsiliasi pendapatan dan belanja setiap bulan;
- 4) Rekonsiliasi laporan keuangan yang dilaksanakan setiap triwulan;
- 5) Penyusunan kebijakan akuntansi yang efektif;
- 6) Bimbingan teknis keuangan daerah; dan
- 7) Pengembangan dan optimalisasi SIKSDA dengan penambahan fitur Catatan Atas Laporan Keuangan (Calk).

b. Indikator Kinerja 2 : Persentase aset tetap terdokumentasi legal

Aset tetap dengan dokumentasi legal adalah Aset tetap yang telah memiliki suatu catatan atau rekaman yang dapat dibuktikan keabsahannya atau dapat dijadikan bukti dalam persoalan hukum. Adapun dokumentasi legal tersebut berupa:

- 1) Tanah berupa Sertifikat (diterbitkan oleh BPN);
- 2) Kendaraan Bermotor berupa BPKB (diterbitkan oleh Satlantas Polri);
- 3) Peralatan Mesin Lainnya berupa Berita Acara Serah terima.

Pengukuran indikator persentase aset tetap terdokumentasi legal dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah aset tetap terdokumentasi legal}}{\text{Jumlah aset tetap}} \times 100\%$$

Sedangkan apabila ditampilkan dalam bentuk tabel, maka rincian dokumentasi legal untuk aset tetap, sebagai berikut :

Tabel 3.7
Aset Tetap Terdokumentasi Legal

Total Aset Tetap	Aset Tetap Berupa Tanah	Tanah Telah Bersertifikat	Tanah Belum Bersertifikat	Total Aset Tetap terdokumentasi Legal	% Aset Tetap Terdokumentasi Legal
483.426	2.653	2.667	14	483.440	100,04

*) unaudited

Sampai dengan tahun 2024 telah dilakukan proses legalisasi aset tanah melalui BPN Kabupaten Sidoarjo, dengan perkembangan berkas yang dalam proses setiap tahunnya sebagai berikut :

Tabel 3.8
Jumlah Tanah yang Bersertifikat

Tahun	Jumlah Berkas
2014	1
2019	8
2020	14
2021	606
2022	20
2023	1.510
2024	508
Total	2.667

Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Tahun 2024 (%)	Target Renstra (2026)	Capaian Terhadap Target Renstra 2026 (%)
99,96%	100,04%	100,08%	99,97%	99,90%

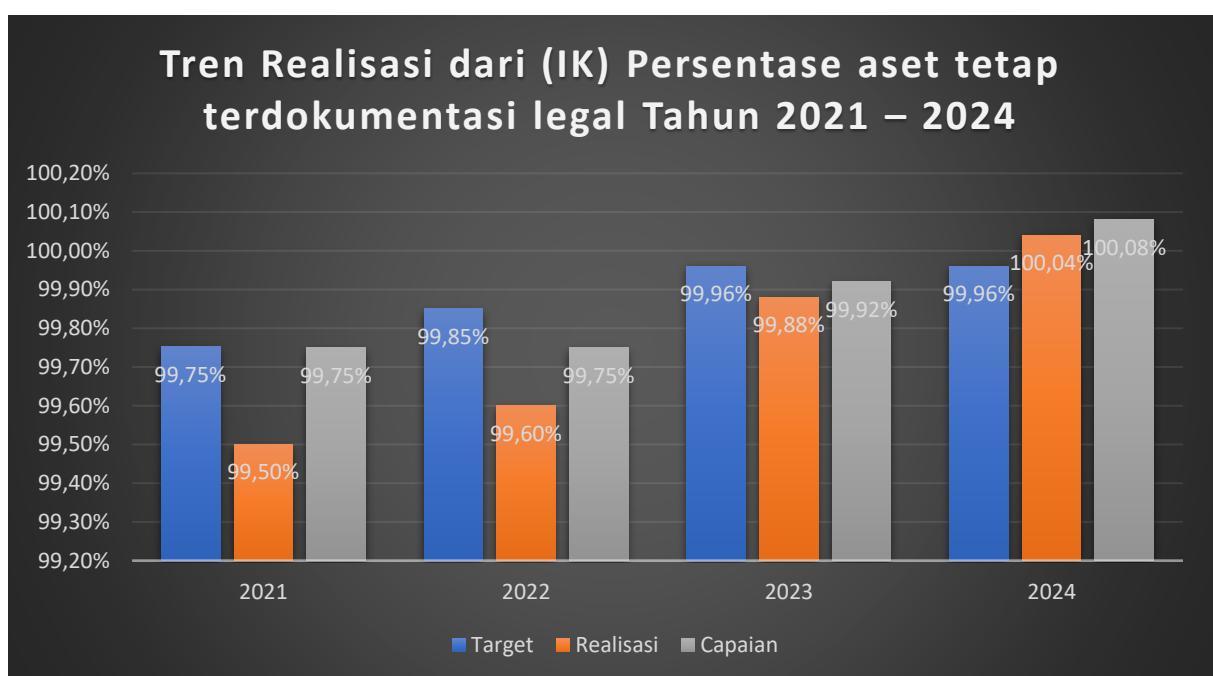
Berdasarkan tabel di atas Capaian Indikator Kinerja (IK) Persentase aset tetap terdokumentasi legal Tahun 2024 dengan realisasi 100,04% dari target 99,96%, dengan persentase sebesar 100,08%. Jika dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra Tahun 2026 sebesar 99,97% maka pada Tahun 2024 sudah tercapai sebesar 100,04%, dengan persentase capaian sebesar 100,08%. Sedangkan bila

dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya mengalami peningkatan atau tren meningkat, karena adanya Komitmen dan Sinergitas yang baik antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dalam rangka proses sertifikasi aset milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang berdampak adanya peningkatan jumlah aset tetap berupa tanah yang telah bersertifikat. sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 9
Tren Realisasi dari (IK) Persentase aset tetap terdokumentasi legal
Tahun 2021 – 2024

Tahun	2021	2022	2023	2024
Target	99,752%	99,85%	99,96%	99,96%
Realisasi	99,50%	99,60%	99,88%	100,04%
Capaian	99,75%	99,75%	99,92%	100,08%

Grafik 3.2
Tren Realisasi dari (IK) Persentase aset tetap terdokumentasi legal
Tahun 2021 – 2024



Apabila dibandingkan dengan target kinerja pada tingkat Kabupaten/Kota maka capaian kinerja untuk indikator kinerja :

Persentase aset tetap Terdokumentasi legal pada BPKAD Kabupaten Sidoarjo lebih tinggi dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Mojokerto. Salah satu upaya yang dilakukan guna meningkatkan kinerja terutama dengan melaksanakan studi komparasi terkait pengamanan BMD ke Kabupaten/Kota lain yang telah berhasil dalam percepatan pensertifikatan tanah.

Berikut perbandingan capaian kinerja pada tingkat Kabupaten/Kota :

Tabel 3.10
Perbandingan Capaian Kinerja Dibandingkan Kabupaten/Kota Lain

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Kinerja Kabupaten/Kota	Keterangan
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang sesuai ketentuan dan akuntabel	Persentase aset tetap terdokumentasi legal	100,04%	100%	BPKPD Kota Mojokerto

Sumber Data: Renstra BPKPD Kota Mojokerto

Sedangkan upaya yang dilakukan agar semakin banyak aset tetap yang terdokumentasi legal adalah sebagai berikut:

- 1) Membentuk tim penyelesaian status kepemilikan aset;
- 2) Penelusuran dokumen guna tertib administrasi;
- 3) Intensif berkoordinasi dengan BPN untuk percepatan proses pensertifikatan;
- 4) Sosialisasi proses sertifikasi kepada pemerintah desa dengan bekerjasama dengan Kecamatan dan BPN;
- 5) Memasang papan nama kepemilikan dan tanda batas tanah.

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada Tahun 2024 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi secara optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran pertama adalah sebagai berikut:

- 1) Aparatur pengelolaan keuangan daerah belum memahami terkait pengelolaan keuangan daerah, yang terdiri dari:
 - a) Penyusunan perencanaan & penganggaran;
 - b) Pelaksanaan anggaran;
 - c) Penatausahaan keuangan;
 - d) Pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan;
 - e) Penyusunan laporan keuangan."
- 2) Belum terintegrasinya sistem informasi keuangan daerah (SIKSDA) dengan sistem informasi BMD (SIM BMD)
- 3) Aparatur pengelolaan BMD belum memahami terkait pengelolaan barang milik daerah:
 - a) Perencanaan & penatausahaan BMD,
 - b) Penggunaan & pemanfaatan BMD,

- c) Pengamanan & pemindahtanganan BMD.
- 4) Kerjasama pengelolaan aset daerah;
 - a) Terdapat aset - aset daerah yang belum termanfaatkan;
 - b) Belum adanya komitmen terhadap pengelolaan dan penertiban aset PSU.
- 5) Koordinasi dalam proses pensertifikatan;
- 6) Adanya penolakan proses pensertifikatan aset pemerintah daerah oleh pemerintah desa.

Pada tingkat Provinsi kami tidak bisa membandingkan dikarenakan indikator utama dan target tidak sama.

2. Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah

a. Indikator Kinerja 1 : Nilai SAKIP

Nilai SAKIP diperoleh dari hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penilaian atas fakta objektif pemerintah dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja.

Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian 2024 (%)	Target Renstra (2026)	Capaian Terhadap Target Renstra 2026 (%)
A (84)	A (84,86)	101,02%	A (85)	99,09%

Sumber Data: LHE SAKIP Tahun 2024

Capaian indikator kinerja (IK) Nilai SAKIP tahun 2024 dengan realisasi nilai 84,86 dari target nilai 84, dengan persentase sebesar 101,02%. Jika dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra tahun 2026 sebesar 85 maka pada tahun 2024 sudah tercapai sebesar 84,86, dengan persentase capaian sebesar 101,02%. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya mengalami peningkatan atau tren meningkat, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.11
Tren Realisasi dari (IK) Nilai SAKIP
Tahun 2021 – 2024

Tahun	2021	2022	2023	2024
Target	A (82,3)	A (83,46)	A (84)	A (84)
Realisasi	A (82,3)	A (82,3)	A (84,23)	A (84,86)
Capaian	100%	100%	100,15%	101,02%

b. Indikator Kinerja 2 : Nilai IPP

Indeks penilaian pelayanan publik (IPP) merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.

Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian 2024 (%)	Target Renstra (2026)	Capaian Terhadap Target Renstra 2026 (%)
A- (4,07)	*) A-(4,24)	104,69%	A- (4,15)	97,59%

Sumber Data: LHE IPP Tahun 2024

Capaian Indikator Kinerja (IK) Nilai IPP Tahun 2024 dengan realisasi sebesar 4,24 dari target sebesar 4,07, dengan persentase sebesar 104,69%. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya mengalami kenaikan cukup signifikan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.13
Tren Realisasi dari (IK) Nilai IPP
Tahun 2021 – 2024

Tahun	2021	2022	2023	2024
Target	B (3,99)	A- (4,03)	B- (4,04)	A- (4,07)
Realisasi	B (3,99)	A- (4,03)	A- (4,05)	B- (4,24)
Capaian	100%	100%	100,24%	104,69%

c. Indikator Kinerja 3: Nilai SKM

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh data hasil pengukuran secara

kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian 2024 (%)	Target Renstra (2026)	Capaian Terhadap Target Renstra 2026 (%)
Sangat Baik (97,00)	Sangat Baik (96,66)	99,64%	Sangat Baik (97,00)	98,45%

Sumber Data: LHE SKM Tahun 2024

Capaian indikator kinerja (IK) Nilai SKM tahun 2024 dengan realisasi nilai 96,66 dari target nilai 97,00, dengan persentase sebesar 99,64%. Jika dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra tahun 2026 dengan target 97,00 maka pada tahun 2024 sudah tercapai nilai 96,66, dengan persentase capaian sebesar 99,64% nilainya meningkat walau belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya mengalami kenaikan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.14
Tren Realisasi dari (IK) Nilai SKM
Tahun 2021 – 2024

Tahun	2021	2022	2023	2024
Target	Sangat Baik (84,65)	Sangat Baik (96,00)	Sangat Baik (97,00)	Sangat Baik (97,00)
Realisasi	Sangat Baik (84,65)	Sangat Baik (96,06)	Sangat Baik (95,50)	Sangat Baik (96,66)
Capaian	100%	100,06%	98,45%	99,64%

Nilai SKM Pada tahun 2024 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2024 , namun jika dibandingkan dengan target masih belum memenuhi target, dikarenakan :

1. Jumlah Koreponden mengisi survey sebanyak 559 orang;
2. Adanya kurang pengetahuan responden dalam mengisi survey.

Untuk mencapai target kinerja Nilai SAKIP, Nilai IPP dan Nilai SKM, pada Tahun 2024 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo

telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu:

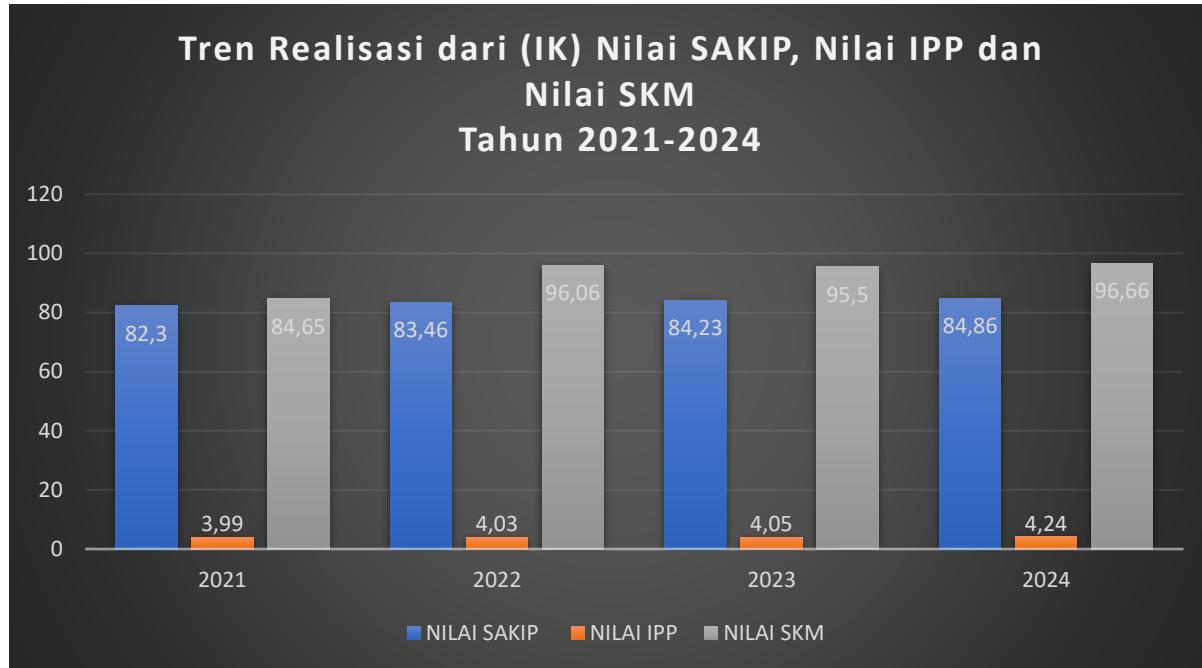
- a. Sosialisasi secara terus menerus tentang reformasi birokrasi SAKIP dan SKM;
- b. Penyusunan pohon kinerja, untuk memetakan kinerja dan kegiatan utama dalam pencapaian kinerja organisasi dan terdistribusi ke seluruh pegawai;
- c. Peningkatan kualitas evaluasi internal sehingga dapat memberikan feedback dalam peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan;
- d. Peningkatan kapasitas pegawai secara berkala melalui pelatihan maupun bentuk peningkatan kompetensi lain secara menyeluruh menyeluruh salah satunya dengan pelaksanaan kegiatan *capacity building*,
- e. Pembuatan sarana dan prasarana penunjang guna peningkatan mutu pelayanan;
- f. Melakukan himbauan baik secara personal maupun organisasi/badan/dinas untuk dapat mengisi survey kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh BPKAD.

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada Tahun 2024 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut dapat diatasi diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi secara optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran kedua adalah sebagai berikut:

- a. Belum semua pegawai memahami tentang reformasi birokrasi dan SAKIP;
- b. Terbatasnya lahan sehingga menghambat dalam upaya memaksimalkan pemenuhan sarana dan prasarana guna peningkatan kualitas layanan;
- c. Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan pelayanan publik masih terbatas.

Realisasi kinerja Tahun 2024 pada sasaran kedua meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Peningkatan kinerja ini lebih banyak disebabkan oleh adanya peningkatan kualitas layanan dan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2021-2024:

Grafik 3.3
Tren Realisasi dari (IK) Nilai SAKIP, Nilai IPP dan Nilai SKM
Tahun 2021 – 2024



B. Realisasi Kinerja Anggaran

1) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran

Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}) - \text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}} \times 100\%$$

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara perkalian pagu anggaran dengan capaian Kinerja dan realisasi anggaran dengan perkalian pagu anggaran dengan capaian kinerja

Tabel 3. 15

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran serta Tingkat Efisiensi Tahun 2024

SASARAN	INDIKATOR	KINERJA			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Kinerja	Target	Realisasi	% anggaran	
			a	b	c		(a*b)-c/(a*b)*100%	
SASARAN 1 Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang sesuai ketentuan dan akuntabel	indikator 1 = Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai SAP	100,00%	100,00%	100,00%	654.876.632.724	646.056.991.341	98,65%	1,35%
	indikator 2 = Persentase aset tetap terdokumentasi legal	99,96%	100,04%	100,08%	3.748.635.158	3.338.697.632	89,06%	11,01%
SASARAN 2 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah	indikator 1 (Nilai SAKIP)	84,00%	84,86%	100,04%	18.915.921.861	18.094.097.468	95,66%	4,38%
	indikator 2 (Nilai IPP)	4,04	4,05					
	indikator 3 (Nilai SKM)	97	96,6					

Sumber Data: Laporan Keuangan, Laporan BMD dan Laporan Realisasi Anggaran

Terkait pagu anggaran pada sasaran 2 yaitu Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah yang tidak bisa dijabarkan untuk tiap-tiap indikator, maka dilakukan perhitungan untuk menghitung capaian kinerja pada sasaran 2 dengan menggunakan rumus :

$$CKP = \prod_{i=1}^m \left(\left(\frac{\text{Realisasi Indikator}_i}{\text{Target Indikator}_i} \right)^{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{m}} \times 100\%$$

Keterangan:

CKP : Capaian Keluaran (*Output*) Program

m : Jumlah Keluaran (*Output*) Program

n : Jumlah indikator Keluaran (*Output*) Program

Pengukuran dilakukan dengan mengalikan semua capaian indikator, kemudian diakar pangkatkan dengan banyaknya jumlah indikator tersebut.

Sehingga berdasarkan tabel diatas, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh OPD/Badan adalah :

- Sasaran Pertama Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang sesuai ketentuan dan akuntabel dengan indikator Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai SAP dengan tingkat efisiensi sebesar 1,35% yang disebabkan oleh faktor keberhasilan antara lain:
 - penyusunan laporan keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan baik melalui tatap muka ataupun daring.

- Sasaran Pertama Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang sesuai ketentuan dan akuntabel dengan indikator Persentase aset tetap terdokumentasi legal dengan tingkat efisiensi sebesar 11,01% yang disebabkan oleh faktor keberhasilan antara lain:

- Pembayaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) untuk pengurusan pensertifikatan tanah tidak dikenakan biaya sesuai PP No 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Sedangkan untuk sasaran Kedua yaitu Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang tidak bisa bisa dijabarkan untuk tiap-tiap indikator, tingkat efisiensi sebesar 4,38%. Merujuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi pada Tahun 2024 tidak dilakukan penilaian RB oleh Kabupaten. Untuk SKM mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2023, namun belum memenuhi target yang ditentukan dikarenakan :

1. Jumlah koresponden yang mengalami kenaikan signifikan dibandingkan tahun 2023 sebesar 559 responden;
2. Adanya kurang pengetahuan responden dalam mengisi survey.

Nilai IPP BPKAD jika dibanding tahun sebelumnya mengalami kenaikan, akan tetapi belum mencapai target yang ditetapkan sehingga ini akan memacu memotivasi kami untuk berkinerja yang baik.

2) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas maka perlu dilakukan analisis untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Selain itu analisis capaian kinerja digunakan untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan sebagai masukan dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2024. Berikut analisis capaian kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024:

Tabel 3. 16
**Program yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja**

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Program/Kegiatan	Anggaran		
				Pagu	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang sesuai ketentuan dan akuntabel	Percentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai SAP	100%	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	654.876.632.724	646.056.991.341	98,65%
			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.111.129.575	997.473.890	86,24%
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	153.550.500	148.002.500	96,39%
			Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	638.505.000	585.356.966	92,34%
			Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	652.973.447.649	644.326.157.985	90,44%
	Percentase aset tetap terdokumentasi legal	100,44%	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.748.635.158	3.338.697.632	89,06%
			Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.748.635.158	3.338.697.632	89,06%
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP	101,02%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	18.915.921.861	18.094.097.468	95,66%
	Nilai IPP	99,50%				
	Nilai SKM	99,64%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.750.000	7.162.000,	92,41%

		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.674.769.931	12.363.429.097	97,54%
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	500.000	-	-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.371.029.875	2.095.802.556	93,79%
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.409.843.966	1.261.755.216	93,10%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.549.185.512	1.506.891.510	97,58%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	902.842.577	859.057.089	95,22%

3) Realisasi Anggaran

Laporan pelaksanaan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk tahun anggaran 2024 berdasarkan realisasi kinerja dan keuangan yaitu sebagai berikut :

Program/Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan waktu penyampaian Dokumen Rancangan KUA-PPAS/Perubahan KUA-PPAS	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	654.876.632.724	646.056.991.341	98,65%
	Ketepatan waktu penyampaian Dokumen Raperbup APBD/PAPBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%			
	Ketepatan waktu penyampaian Dokumen Raperda APBD/PAPBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%			

	Percentase realisasi penyaluran belanja transfer	100%	90,44%	90,44%			
	Prosentase SKPD yang tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan yang sesuai dengan SAP	100%	100%	100%			
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1. Persentase Dokumen kebijakan yang tersusun	100%	100%	100%	1.111.129.575	997.473.890	86,24%
	2. Persentase Dokumen anggaran daerah yang tersusun	100%	100%	100%			
Koordinasi dan Pengelolaan Perpendaharaan Daerah	Prosentase penerbitan SP2D yang tepat waktu	100%	100%	100%	153.550.500	148.002.500	96,39%
Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Percentase dokumen pelaporan keuangan Pemerintah Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	100%	100%	638.505.000	585.356.966	92,34%
Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	Percentase realisasi penyaluran belanja transfer	100%	90,44%	90,44%	652.973.447.649	644.326.157.985	90,44%
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Prosentase aset tetap tanah yang telah bersertifikat	82,81%	100,52%	121,38%	3.748.635.158	3.338.697.632	89,06%
	Prosentase OPD yang tepat waktu dalam penyampaian laporan BMD	100%	100%	100%			
	Prosentase pemanfaatan BMD yang diproses	100%	100%	100%			
	Prosentase pemindahtempaan BMD yang diproses melalui lelang umum	100%	100%	100%			
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Percentase permohonan penerbitan sertifikat tanah yang diproses oleh BPN	100%	100%	100%	3.748.635.158	3.338.697.632	89,06%
	Percentase permohonan pemindahtempaan BMD yang diproses	100%	100%	100%			
	Jumlah OPD yang tepat waktu dalam penyampaian laporan BMD	48 OPD	48 OPD	100%			
	Percentase permohonan	100%	100%	100%			

	pemanfaatan BMD yang diproses						
Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	80%	100%	125%	17.435.775.010	16.817.819.972	96,46%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan	2 Tahapan	2 Tahapan	100%	7.750.000	7.162.000,	92,41%
	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100%			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	80%	97,54%	121,92%	12.674.769.931	12.363.429.097	97,54%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang disiplin	80%	80%	100%	500.000,00	-	-
	Persentase ASN yang mengikuti pelatihan yang bersertifikat	80%	100%	125%			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	100%	125%	2.221.029.875	1.945.862.556	94,86%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dan jenis BMD yang diadakan	20 Unit	20 Unit	100	1.409.843.966	1.261.755.216	93,10%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	100%	87,04%	108,8	1.549.185.512	1.506.891.510	97,58%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dilakukan pemeliharaan	100%	100%	100	902.842.577	859.057.089	95,22%

Sumber Data : Laporan realisasi anggaran TA 2024

C. Inovasi

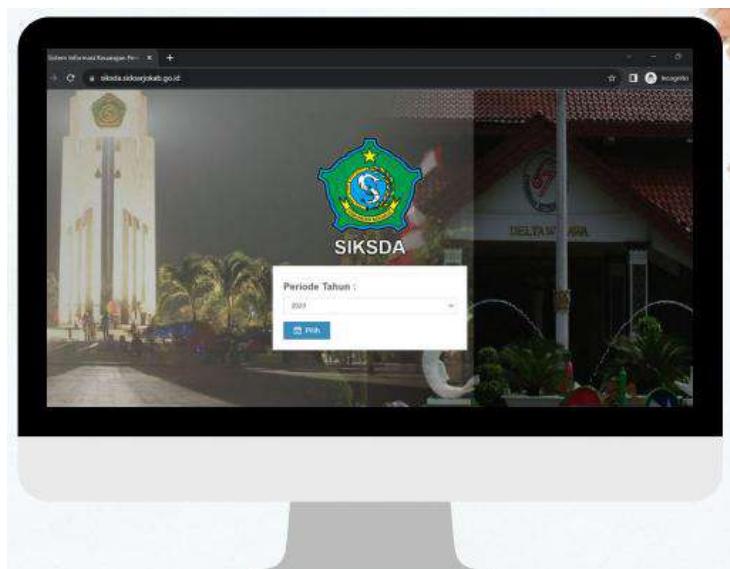
Pada Tahun 2024 dalam rangka mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan daerah, percepatan transaksi keuangan berbasis web dan meminimalisir penggunaan ATK dalam pencairan keuangan di Aplikasi SIKSDA. BPKAD membuat inovasi penambahan fitur pada Aplikasi SIKSDA sebagai berikut:

- NON TUNAI;

Adanya non tunai diharapkan pencairan terkait PPB dapat langsung dicairkan oleh Bendahara OPD.

2. PAPERLESS

Adanya Paperless juga diharapkan kepada semua OPD dalam pencairan transaksi keuangan tidak memerlukan dokumen fisik dan Verifikasi PA langsung dilakukan *real time* dan dapat dilakukan dimanapun dan terkoneksi dengan BSrE.



Fitur Non Tunai telah disosialisasikan di Prigen Bulan Maret tahun 2018 dan Paperless telah disosialisasikan di Batu pada bulan Februari 2022, dimana Bimbingan Teknis diikuti oleh 49 OPD termasuk admin kecamatan.

Keberlanjutan Inovasi SIKSDA di BPKAD

Strategi Institusional :

SE Bupati tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Penatausahaan dengan SIKSDA di Kabupaten Sidoarjo Nomor 900/345/438.6.2/2021 tanggal 18 Januari 2021 Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Non Tunai Dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Strategi Sosial :

mengoptimalkan keterlibatan perangkat daerah dalam pelaksanaan penatausahaan dengan SIKSDA

Strategi Manajerial :

mengadakan bimbingan teknis kepada OPD (staf admin, bendahara pengeluaran, pejabat penatausahaan keuangan) dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan.

Pengembangan SIKSDA tahun 2024 pada fitur Akuntansi berupa otomatisasi Laporan Keuangan dalam hal ini adalah Catatan atas Laporan Keuangan yang mana selama tahun sebelumnya dikerjakan secara manual.

Berikut Pengembangan/penambahan fitur pada Aplikasi SIKSDA :

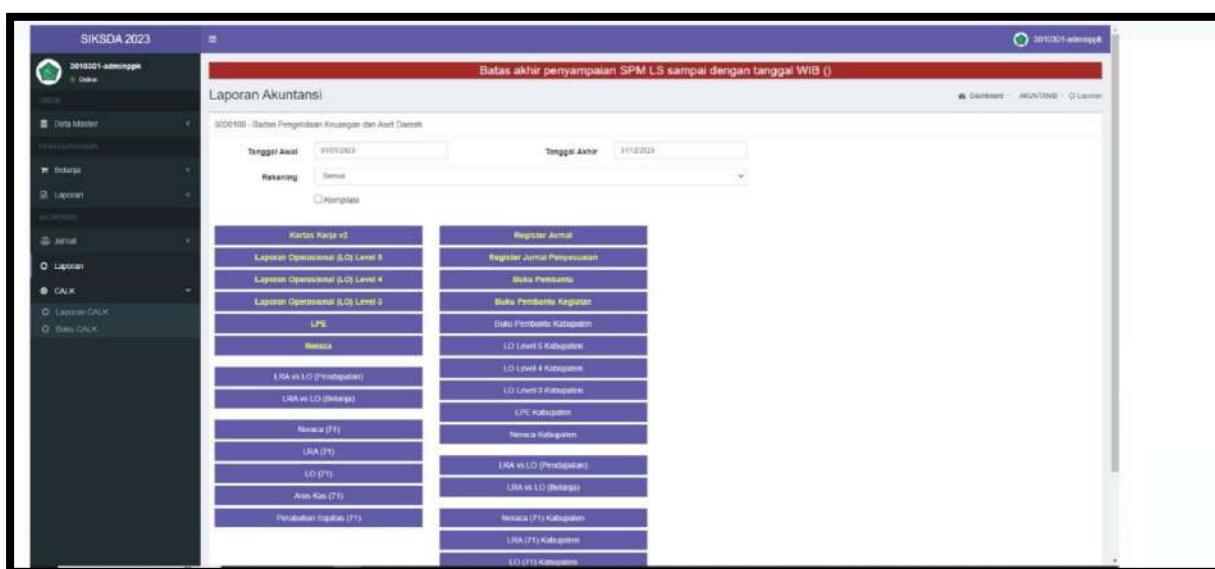
Fitur Calk Pada Siksda terdiri atas dua :

1. Laporan Calk; dan

Fitur Laporan Calk digunakan untuk menyajikan tabel-tabel Calk berdasarkan data penatausahaan yang ada di SIKSDA.

2. Buku Calk.

Fitur Buku Calk digunakan untuk mendownload bagian buku-buku Calk.



Keunggulan SIKSDA

1. Integrasi dengan Bank Jatim untuk pencairan secara langsung dari SIKSDA secara realtime, untuk PPB dan SP2D.
2. Integrasi dengan LPSE untuk mengetahui nilai TKDN barang.
3. Integrasi dengan BSRE untuk TTE sehingga tidak perlu lagi menggunakan Tanda Tangan Basah, untuk SPM dan SP2D.

Rencana Inovasi SIKSDA

1. Akan dilakukan integrasi dengan aplikasi SIMGAJI untuk pencairan TPP & Tukin sehingga tidak perlu menghitung manual lagi.
2. Akan dibuatkan VA & QRIS untuk memudahkan identifikasi coring pendapatan.

Kendala SIKSDA

1. Keamanan jaringan dan server (Server pernah terkena hack).
2. Adanya kewajiban agar daerah menggunakan aplikasi SIPD, sehingga ada keraguan untuk mengembangkan SIKSDA.

Pada Tahun 2024 SIKSDA mendapat penghargaan Top Ten Inotek Awards Kategori Inovasi Daerah.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk tahun 2024 yaitu 2 (dua) sasaran dengan kategori sangat berhasil. Namun begitu masih diperlukan upaya perbaikan/penyempurnaan, sehingga pencapaian sasaran pada tahun berikutnya dapat lebih optimal.

Terdapat kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja, antara lain:

1. Aparatur pengelolaan keuangan daerah belum memahami terkait pengelolaan keuangan daerah, yang terdiri dari:
 - a. Penyusunan perencanaan & penganggaran;
 - b. Pelaksanaan anggaran;
 - c. Penatausahaan keuangan;
 - d. Pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan;
 - e. Penyusunan laporan keuangan.
2. Belum terintegrasinya sistem informasi keuangan daerah (SIKSDA) dengan sistem informasi BMD (SIM BMD)
3. Aparatur pengelolaan BMD belum memahami terkait pengelolaan barang milik daerah:
 - a. Perencanaan & penatausahaan BMD;
 - b. Penggunaan & pemanfaatan BMD;
 - c. Pengamanan & pemindahtanganan BMD.
4. Kerjasama pengelolaan aset daerah;
 - a. Terdapat aset - aset daerah yang belum termanfaatkan;
 - b. Belum adanya komitmen terhadap pengelolaan dan penertiban aset PSU.
5. Adanya penolakan proses pensertifikatan aset pemerintah daerah oleh pemerintah desa.

B. Pemecahan Masalah/Tindak Lanjut

Untuk meningkatkan kinerja agar lebih optimal pada tahun berikutnya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo telah melakukan beberapa cara upaya, antara lain:

1. Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Pelaksanaan pendampingan dan verifikasi penyusunan APBD/PAPBD untuk mengurangi terjadinya kesalahan pemilahan kode rekening pendapatan/belanja;
- b. Pendampingan penyusunan laporan keuangan sehingga mengurangi terjadinya kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan;
- c. Rekonsiliasi pendapatan dan belanja dengan OPD yang dilaksanakan tiap bulan;
- d. Rekonsiliasi laporan keuangan dengan OPD yang dilaksanakan tiap triwulan;
- e. Penyusunan kebijakan akuntansi sebagai pedoman penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah;
- f. Peningkatan kompetensi pengelola keuangan daerah dengan melaksanakan bimtek keuangan daerah;
- g. Pengembangan aplikasi SIKSDA.

2. Pengelolaan Barang Milik Daerah

- a. Rekonsiliasi laporan BMD yang dilaksanakan tiap triwulan;
- b. Optimalisasi SIM BMD;
- c. Melakukan penilaian terhadap obyek – obyek sewa BMD
- d. Membentuk tim penyelesaian status kepemilikan aset;
- e. Penelusuran dokumen guna tertib administrasi;
- f. Intensif berkoordinasi dengan BPN untuk percepatan proses pensertifikatan;
- g. Sosialisasi secara massif ke desa melalui kecamatan;
- h. Memasang papan nama kepemilikan dan tanda batas tanah;
- i. Membentuk tim korlap di masing-masing OPD untuk percepatan pensertifikatan tanah.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

- Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan PK Perubahan Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024

https://drive.google.com/file/d/19QHky_kCwd5TYINKjZog05UYDyYLM0IJ/view?usp=sharing

<https://drive.google.com/file/d/1wQOG-3GkBhijOsaWIFCBswbAJ7HVt0b6/view?usp=sharing>

<https://drive.google.com/file/d/1ot0LZP9mYYI14NIEG54j7QjuC4ee0qLn/view?usp=sharing>

<https://drive.google.com/file/d/1llr0b84-G5JdzRHGT3OdUYeEH5o-aUec/view?usp=sharing>

B. Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

- Dok. SK. Kepala Perangkat Daerah tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

<https://drive.google.com/file/d/1S9Vc3WoyXNC1kbCvGUbSEtXNeHd-Zivj/view?usp=sharing>

C. Rencana Aksi Perangkat Daerah Tahun 2024

- Dok. Rencana Aksi Perangkat Daerah Tahun 2024

<https://drive.google.com/file/d/1S9Vc3WoyXNC1kbCvGUbSEtXNeHd-Zivj/view?usp=sharing>

D. Pohon Kinerja yang menunjang sasaran kinerja 2024

<https://drive.google.com/file/d/11NLPXxokOGbHNpQxaN5Qs-wEDeuUeAdD/view>

E. Capaian Prestasi / Penghargaan Perangkat Daerah Tahun 2024

<https://drive.google.com/file/d/1zZ6LZM9Hn9q6WuW19DwAsW83P5XaLhWS/view?usp=sharing>

F. Matriks Renstra/ Renja

<https://drive.google.com/file/d/1cjG8IQgp3f4MleWW2bc4XHKEH2wsgB8m/view?usp=sharing>

G. LHE SAKIP Tahun 2023 dan Nilai SAKIP 2024

<https://drive.google.com/file/d/1H5C8TJyECf4cMjryvSUCfLM1WzK9Vs2/view?usp=sharing>

https://drive.google.com/file/d/15_YHAJ--rEs3JZ2VeikQa6CyDGYY9FKR/view?usp=sharing

H. Tanggapan/ Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP Tahun 2023

https://drive.google.com/file/d/1WE4FQKpqv_E9-09RPKXM14wHvTmxQAc7/view?usp=sharing

I. Bukti Dukung Pengukuran Kinerja Setiap Indikator Kinerja

<https://drive.google.com/file/d/1eEtRynndv4y22yrzT9dTG028DFArbrYw/view?usp=sharing>

J. Pencanangan Zona Integritas BPKAD dan Surat Usulan Penilaian Pembangunan Zona Integritas BPKAD Menuju WBK/WBBM Tahun 2025

<https://drive.google.com/file/d/1d9gFMcElf6S1oczWvDihHy5IuTHKYZji/view?usp=sharing>

<https://drive.google.com/file/d/1mefw7duii9m3GQkizdITIX38ZOtJvXsh/view?usp=sharing>